Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 293-300
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20832803

Food as a Power: Ketergantungan Impor Beras Indonesia dalam Geo Ekonomi Global

Food as a Source of Power: Indonesia's Dependence on Rice Imports in the Global Geoeconomy

Yakhin Oktoryanta Surbakti
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: rianta588@gmail.com

Abstrak

Beras bukan sekadar komoditas pangan, melainkan instrumen kekuasaan dalam tata kelola ekonomi-politik global. Artikel ini mengkaji bagaimana ketergantungan Indonesia terhadap impor beras menempatkan negara ini dalam posisi rentan di tengah dinamika geoekonomi dunia yang semakin terfragmentasi. Dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research)*, penelitian ini menelaah data produksi, konsumsi, dan impor beras Indonesia periode 2019–2025, serta menghubungkannya dengan kerangka teori ketahanan pangan, geopolitik pangan, dan ketergantungan ekonomi (*dependency theory*). Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusutan lahan sawah, perubahan iklim, dan tingginya konsumsi per kapita menjadi pendorong struktural impor, sementara faktor geopolitik—seperti kebijakan pembatasan ekspor oleh India dan negara produsen utama lainnya—memperburuk kerentanan rantai pasok beras nasional. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada analisis ekonometrik dampak impor terhadap harga dan stabilitas domestik, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan logika kekuasaan dalam sistem perdagangan pangan global. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan beras sebagai instrumen geoekonomi yaitu alat tawar-menawar (*bargaining power*) sekaligus titik lemah kedaulatan nasional. Temuan menegaskan perlunya strategi diversifikasi sumber impor, penguatan cadangan pangan pemerintah, revitalisasi irigasi, dan diversifikasi konsumsi karbohidrat sebagai langkah mitigasi struktural, bukan sekadar kebijakan reaktif jangka pendek.
Kata kunci: *ketahanan pangan, impor beras, geoekonomi, kedaulatan pangan, Indonesia*

Abstract

Rice is not merely a food commodity but also an instrument of power in the global political-economic order. This article examines how Indonesia's dependence on rice imports places the country in a vulnerable position amid the increasingly fragmented dynamics of the global geoeconomy. Using a library research method, the study analyzes Indonesia's rice production, consumption, and import data from 2019 to 2025 and relates them to the theoretical frameworks of food security, food geopolitics, and economic dependency theory. The findings indicate that the reduction of paddy fields, climate change, and high per capita rice consumption are the main structural drivers of imports. At the same time, geopolitical factors—such as export restrictions imposed by India and other major rice-producing countries—have exacerbated vulnerabilities in Indonesia's national rice supply chain. Previous studies have largely focused on econometric analyses of the effects of rice imports on domestic prices and market stability, without explicitly linking these issues to the logic of power within the global food trade system. This article addresses that gap by positioning rice as a geoeconomic instrument, serving both as a source of bargaining power and as a point of weakness for national sovereignty. The findings underscore the need for strategies such as diversifying import sources, strengthening government food reserves, revitalizing irrigation infrastructure, and promoting diversification of carbohydrate consumption as forms of structural mitigation rather than merely short-term reactive policies.
Keywords: *food security, rice imports, geoeconomics, food sovereignty, Indonesia*

Article Info
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, beras menempati posisi yang jauh melampaui sekadar bahan pangan pokok. Ia adalah penanda identitas budaya, instrumen stabilitas politik, sekaligus barometer kesejahteraan rakyat. Hampir seluruh penduduk Indonesia—diperkirakan mencapai 95 persen—menjadikan beras sebagai

sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi harian mereka, sehingga komoditas ini memiliki kedudukan strategis baik secara sosial, politik, maupun ekonomi (Jurnal Pangan, 2024). Ironisnya, negara yang dikenal sebagai negeri agraris dengan lahan pertanian luas justru tidak pernah benar-benar lepas dari ketergantungan pada pasokan beras dari luar negeri, sebuah kondisi yang menurut catatan sejarah sudah berlangsung sejak era Orde Baru hingga kini (KIME FEB UNNES, 2024).

Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023, Indonesia mencetak rekor impor beras terbesar sepanjang era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni sekitar 3,06 juta ton, dan angka tersebut bahkan ditargetkan meningkat menjadi 3,6 juta ton pada tahun berikutnya (KIME FEB UNNES, 2024). Padahal pada tahun yang sama, produksi padi nasional masih tercatat signifikan—sekitar 53,63 juta ton gabah, meski angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton (Journal of Keberlanjutan, 2024). Penurunan luas panen turut menjadi faktor pemicu: luas panen padi nasional menyusut dari 10,45 juta hektare pada 2022 menjadi 10,21 juta hektare pada 2023, dan kembali turun menjadi 10,05 juta hektare pada 2024 (Journal of Keberlanjutan, 2024; Forum Agribisnis, 2024). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural antara kapasitas produksi domestik dan kebutuhan konsumsi yang terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melampaui 270 juta jiwa (Perwira Journal of Economy & Business, 2023).

Yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah konteks global yang sedang bergeser dari tatanan perdagangan bebas menuju apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai geoeconomic fragmentation, yakni fragmentasi ekonomi global yang didorong oleh pertimbangan geopolitik (SEI, 2024). Dalam suasana seperti ini, negara-negara produsen pangan cenderung lebih mengutamakan kepentingan domestik mereka sendiri ketimbang komitmen terhadap pasar bebas internasional. Contoh paling nyata terjadi pascainvasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketika sejumlah negara pengekspor beras utama—India, Bangladesh, Kamerun, Kuwait, Lebanon, dan Rusia—serentak memberlakukan pembatasan atau larangan ekspor beras demi mengamankan stok pangan domestik mereka (PMC, 2024). Kebijakan proteksionis semacam ini memperlihatkan bahwa pangan, khususnya beras, telah menjelma menjadi instrumen kekuasaan (*food as power*) yang dapat digunakan negara produsen untuk menekan negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Konsep "pangan sebagai kekuatan" ini sejalan dengan kajian geopolitik pangan kontemporer yang menyoroti bagaimana krisis pangan global—mulai dari lonjakan harga pangan 2007/2008, pandemi COVID-19, hingga perang Rusia-Ukraina 2022—senantiasa diwarnai oleh dimensi kekuasaan politik dan ekonomi yang saling bertautan (Springer Nature, 2023). Dengan kata lain, ketergantungan impor bukan semata persoalan teknis pemenuhan kebutuhan domestik, melainkan juga soal posisi tawar suatu negara dalam konstelasi kekuatan ekonomi global. Bagi Indonesia, ketergantungan terhadap impor beras berarti menyerahkan sebagian kedaulatan pangan—dan secara tidak langsung kedaulatan politik—kepada negara-negara pengekspor maupun dinamika pasar internasional yang sulit dikendalikan.

Dari sisi domestik, ketergantungan ini juga menimbulkan dilema kebijakan yang pelik. Di satu sisi, impor beras kerap dijadikan instrumen untuk meredam gejolak harga ketika produksi domestik mengalami penurunan, terutama akibat fenomena iklim ekstrem seperti *El Niño* (Jurnal MEA, 2025). Namun di sisi lain, keputusan mengimpor beras—apalagi jika dilakukan menjelang musim panen—justru berisiko menjatuhkan harga gabah di tingkat petani secara drastis, sehingga merugikan produsen lokal yang seharusnya dilindungi (KIME FEB UNNES, 2024). Kondisi ini menggambarkan adanya ketegangan struktural antara kepentingan menjaga stabilitas harga bagi konsumen perkotaan dan kepentingan melindungi kesejahteraan petani di pedesaan—dua kelompok yang sama-sama menjadi basis legitimasi politik pemerintah.

LITERATURE REVIEW

Kajian-kajian terdahulu mengenai impor beras Indonesia umumnya didominasi oleh pendekatan ekonometrik yang berfokus pada hubungan kuantitatif antara volume impor dengan variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan harga domestik (lihat misalnya Jurnal JIMBE, 2024; Paipan & Abrar, 2020). Penelitian semacam ini memang penting untuk memahami mekanisme transmisi harga, namun cenderung memperlakukan impor beras sebagai variabel teknis-ekonomi semata, tanpa menempatkannya dalam kerangka analisis kekuasaan (*power analysis*) yang lebih luas. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam literatur geopolitik pangan, keputusan negara produsen untuk membatasi ekspor—seperti yang dilakukan India pasca-2022—bukanlah semata keputusan ekonomi, melainkan juga keputusan politik yang sarat kepentingan strategis (PMC, 2024).

Penelitian lain, seperti kajian determinan rasio ketergantungan impor beras Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan persamaan simultan (Jurnal Pangan, 2024), lebih menitikberatkan pada faktor-faktor domestik seperti luas areal irigasi, produktivitas lahan, dan luas panen, sembari relatif mengabaikan dimensi eksternal berupa dinamika geoekonomi global yang turut menentukan ketersediaan dan harga beras di pasar internasional. Demikian pula penelitian perbandingan kebijakan pangan Indonesia-Thailand (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025) yang lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan dan logistik domestik, tanpa secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan konsep "pangan sebagai instrumen kekuasaan" dalam interaksi antarnegara.

Celah penelitian yang dapat diidentifikasi dari kajian-kajian terdahulu setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, minimnya kajian yang secara eksplisit menghubungkan data empiris ketergantungan impor beras Indonesia dengan kerangka teori geoekonomi dan geopolitik pangan secara terintegrasi, bukan sekadar menyinggungnya sebagai konteks tambahan. Kedua, kurangnya analisis kritis mengenai bagaimana posisi Indonesia sebagai *net importer* beras memengaruhi daya tawar (*bargaining position*) negara ini dalam forum-forum perdagangan internasional maupun hubungan bilateral dengan negara-negara produsen utama seperti India, Thailand, dan Vietnam. Ketiga, terbatasnya pembahasan mengenai implikasi jangka panjang ketergantungan impor terhadap kedaulatan nasional, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi jangka pendek pada isu stabilitas harga dan kesejahteraan petani semata.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yang memadukan data empiris terkini mengenai produksi, konsumsi, dan impor beras Indonesia dengan kerangka teori geoekonomi, ketahanan pangan, dan dependensi struktural. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi kekuasaan pangan global, sekaligus merumuskan implikasi kebijakan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis faktor-faktor struktural domestik yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor beras; kedua, mengkaji bagaimana dinamika geoekonomi dan geopolitik global memengaruhi rantai pasok dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan beras internasional; dan ketiga, merumuskan strategi kebijakan yang dapat mengurangi kerentanan struktural Indonesia tanpa mengabaikan kebutuhan stabilitas harga jangka pendek.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research atau literature review*). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian lebih berorientasi pada sintesis dan analisis kritis terhadap data sekunder serta literatur yang sudah ada, ketimbang pengumpulan data primer di lapangan (Abdussamad, 2021). Sumber data yang digunakan mencakup tiga kategori utama: pertama, laporan resmi lembaga negara seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) terkait data produksi, konsumsi, dan impor beras; kedua, artikel

jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2025 yang membahas isu ketahanan pangan, geopolitik pangan, dan ekonomi politik perdagangan beras; serta ketiga, laporan organisasi internasional seperti FAO, World Bank, dan IMF yang relevan dengan dinamika geoekonomi pangan global.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data—dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus kajian—dilanjutkan dengan kategorisasi tematik berdasarkan tiga kerangka teori yang digunakan, yaitu ketahanan pangan, geopolitik pangan, dan dependensi struktural. Tahap akhir berupa sintesis dan interpretasi, di mana temuan dari berbagai sumber dirangkai menjadi narasi analitis yang koheren untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan triangulasi sumber turut digunakan untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan data dari lembaga pemerintah, hasil penelitian akademik, dan laporan organisasi internasional guna menghindari bias dari satu jenis sumber semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Ketergantungan Impor Beras Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kerentanan

Data menunjukkan tren impor beras Indonesia yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras—rekor tertinggi sepanjang era Presiden Jokowi—dan angka ini ditargetkan naik menjadi 3,6 juta ton pada 2024 (KIME FEB UNNES, 2024). Padahal pada periode yang sama, Indonesia tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen padi terbesar dunia, dengan produksi padi mencapai sekitar 54 juta ton pada 2023 (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Paradoks ini—negara produsen besar yang tetap harus mengimpor dalam jumlah signifikan—mengindikasikan bahwa persoalan bukan semata soal kapasitas produksi absolut, melainkan soal kesenjangan antara produksi neto (setelah dikurangi kebutuhan benih, pakan, dan susut pascapanen) dengan konsumsi domestik yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Setidaknya terdapat empat faktor struktural domestik yang mendorong ketergantungan ini. Pertama, penyusutan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian, seperti perumahan dan kawasan industri (Perwira Journal of Economy & Business, 2023). Data memperlihatkan luas panen padi nasional terus menurun dari 10,45 juta hektare pada 2022 menjadi 10,21 juta hektare pada 2023, dan turun lagi menjadi 10,05 juta hektare pada 2024 (Journal of Keberlanjutan, 2024). Tren penyusutan ini jelas kontraproduktif terhadap upaya swasembada, sebab pengurangan luas lahan secara langsung membatasi potensi peningkatan produksi meski dengan intensifikasi teknologi sekalipun.

Kedua, perubahan iklim, khususnya fenomena *El Niño*, yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan menurunkan produktivitas tanaman padi secara signifikan (Jurnal MEA, 2025; Journal of Keberlanjutan, 2024). Sensitivitas tanaman padi terhadap variasi iklim—mulai dari banjir, kekeringan, hingga salinisasi lahan—membuat komoditas ini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap guncangan iklim dibandingkan komoditas pangan pokok lainnya (PMC, 2024). Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin sulit, mengingat negara ini secara geografis berada di kawasan yang rentan terhadap variabilitas iklim ekstrem.

Ketiga, tingginya tingkat konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia, meski tren ini sebenarnya menunjukkan sedikit penurunan menjadi rata-rata 80 kilogram per kapita per tahun pada 2024 (Perwira Journal of Economy & Business, 2023). Dengan populasi yang melampaui 270 juta jiwa, bahkan penurunan konsumsi per kapita yang relatif kecil pun tetap menghasilkan permintaan agregat yang sangat besar, sehingga tekanan terhadap pasokan domestik tidak serta-merta berkurang secara proporsional.

Keempat, infrastruktur irigasi yang belum optimal. Kajian dalam Jurnal Pangan (2024) menggunakan data 1998–2021 menemukan bahwa perluasan areal irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas panen, meski pengaruhnya terhadap produktivitas belum signifikan.

Implikasinya, kebijakan peningkatan irigasi yang konsisten berpotensi menambah luas panen, produksi, dan pada akhirnya menurunkan rasio ketergantungan impor secara bertahap. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak jaringan irigasi nasional dalam kondisi rusak atau tidak terawat, sehingga potensi peningkatan produksi melalui jalur ini belum sepenuhnya tergarap maksimal.

Dimensi Geoekonomi: Beras sebagai Instrumen Kekuasaan Global

Jika pada bagian sebelumnya pembahasan berfokus pada faktor domestik, bagian ini menyoroti dimensi eksternal yang justru menjadi inti argumentasi artikel ini: bagaimana beras berfungsi sebagai instrumen kekuasaan (*power*) dalam tata kelola geoekonomi global, dan bagaimana posisi Indonesia sebagai net importer menempatkannya pada posisi yang rentan secara struktural.

Momentum paling jelas yang memperlihatkan logika "*food as power*" ini terjadi pascainvasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Konflik tersebut memicu gangguan signifikan terhadap rantai pasok pangan global, termasuk gandum dan jagung, yang kemudian merembet pada kekhawatiran terhadap ketersediaan beras di pasar internasional. Sebagai respons, sejumlah negara produsen dan pengekspor utama—India, Bangladesh, Kamerun, Kuwait, Lebanon, dan bahkan Rusia sendiri—memberlakukan kebijakan pembatasan atau larangan ekspor beras demi mengamankan stok domestik mereka (PMC, 2024). India, sebagai eksportir beras terbesar dunia yang menguasai porsi signifikan dari total volume perdagangan beras global, secara khusus memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati pada pertengahan 2023—sebuah kebijakan yang memiliki dampak berantai terhadap negara-negara pengimpor di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Kebijakan semacam ini tidak dapat dipahami semata sebagai respons teknokratis terhadap kondisi pasokan domestik. Ia juga mencerminkan kalkulasi politik yang lebih luas: negara produsen pangan besar memiliki insentif struktural untuk memprioritaskan stabilitas domestik mereka sendiri di atas komitmen terhadap mitra dagang internasional, terutama di tengah situasi krisis yang dapat mengancam legitimasi politik pemerintah yang berkuasa. Dalam kerangka geopolitik pangan yang dikembangkan *Sommerville, Essex, dan Le Billon* (2014), fenomena ini disebut sebagai *securitization of food*—proses di mana pangan diperlakukan sebagai isu keamanan nasional yang membenarkan tindakan proteksionis, bahkan ketika tindakan tersebut merugikan negara-negara lain yang bergantung pada pasokan tersebut.

Fragmentasi geoekonomi global semakin memperburuk situasi ini. Laporan dari Stockholm Environment Institute (2024) menggarisbawahi bahwa di tengah percepatan fragmentasi ekonomi global, negara-negara cenderung mengunci mitra dagang eksklusif melalui perjanjian bilateral dan mengamankan akses terhadap komoditas pangan dengan cara membatasi akses pihak lain ke pasar global, atau bahkan melalui embargo ekonomi terhadap negara tertentu. Dinamika ini, ditambah dengan ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu jalur perdagangan dan titik-titik strategis (*chokepoints*) pelayaran internasional, berpotensi memicu guncangan harga lebih lanjut dan gangguan pada pasar pangan global secara keseluruhan. *World Economic Forum* dalam laporan *Global Risks Report* 2019 bahkan telah mengantisipasi bahwa ketegangan geopolitik yang meningkat dan fragmentasi perdagangan dalam komunitas internasional akan berkontribusi pada politisasi pangan dan memperburuk risiko gangguan pasokan yang "termotivasi secara geopolitik" (SEI, 2024).

Bagi Indonesia, implikasi dari dinamika ini sangat signifikan. Sebagai net importer beras yang konsisten, Indonesia berada pada posisi tawar yang lemah ketika negara-negara produsen utama memutuskan untuk membatasi ekspor mereka. Ketergantungan Indonesia pada sejumlah kecil negara pemasok utama—terutama Thailand, Vietnam, dan India—membuat rantai pasok beras nasional sangat rentan terhadap keputusan sepihak negara-negara tersebut. Dalam konteks pertahanan negara, kerentanan ini bahkan telah diidentifikasi sebagai ancaman serius: jika rute perdagangan internasional terganggu akibat perang atau konflik regional dan global, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan menjadi titik lemah yang signifikan bagi kedaulatan nasional (Journal of Defense Technology and Engineering, 2025).

Perbandingan dengan Thailand: Pelajaran dari Negara Eksportir

Perbandingan dengan Thailand—yang secara konsisten menjadi salah satu eksportir beras terbesar dunia dengan volume ekspor mencapai sekitar 9,2 juta ton pada 2024—memberikan perspektif yang berharga untuk memahami posisi struktural Indonesia (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Indonesia, meski memproduksi 54 juta ton gabah pada 2023—jauh lebih besar dibanding total ekspor Thailand—tetap saja kerap harus melakukan impor untuk menstabilkan pasokan domestik. Perbedaan mendasar ini terletak pada orientasi kebijakan: Thailand menganut strategi yang lebih berorientasi pasar dan ekspor, sementara Indonesia menerapkan strategi intervensionis negara yang memprioritaskan stabilitas harga domestik dan akses pangan melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025).

Namun demikian, strategi intervensionis Indonesia bukan tanpa kelemahan. Kebijakan impor yang bersifat protektif melalui sistem kuota dan perizinan yang kompleks justru dinilai telah melemahkan kapasitas industri hilir dan meningkatkan biaya logistik (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Selain itu, faktor geografis kepulauan Indonesia turut memperburuk efisiensi distribusi pangan domestik. Indonesia menempati peringkat ke-63 dalam *World Bank Logistics Performance Index*, jauh tertinggal dari Thailand yang berada di peringkat ke-37—sebuah kesenjangan yang mencerminkan tantangan distribusi akibat kondisi geografis kepulauan dan kesenjangan infrastruktur (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Implikasinya, persoalan ketergantungan impor beras Indonesia tidak semata soal kapasitas produksi, melainkan juga soal efisiensi distribusi domestik yang turut menentukan seberapa jauh produksi nasional dapat secara efektif menjangkau seluruh wilayah tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar.

Di sisi lain, strategi Thailand yang berorientasi ekspor pun memiliki kerentanannya sendiri. Ketergantungan pada pasar ekspor dan investasi asing menghadirkan kerentanan tersendiri ketika terjadi gangguan global, seperti pandemi atau konflik geopolitik (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Pengalaman Thailand dengan skema penjaminan harga beras (*rice pledging scheme*) yang justru kontraproduktif terhadap daya saing global negara tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tidak selaras dengan logika pasar dapat merusak struktur ekspor yang telah lama terbangun. Pelajaran ini menegaskan bahwa baik strategi intervensionis maupun orientasi ekspor sama-sama memiliki risiko struktural masing-masing, sehingga yang dibutuhkan adalah keseimbangan kebijakan yang adaptif terhadap konteks domestik dan global secara simultan.

Beras sebagai Cermin Kerentanan Kedaulatan Nasional

Menyandingkan temuan-temuan di atas dengan kerangka teori dependensi, dapat dilihat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras bukan sekadar persoalan teknis pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan juga representasi dari pola hubungan tidak setara antara Indonesia dengan negara-negara produsen utama dalam sistem ekonomi politik global. Ketika Indonesia harus menyesuaikan kebijakan domestiknya—baik soal volume impor, waktu pelaksanaan, maupun sumber negara asal—dengan mempertimbangkan kebijakan ekspor negara lain, maka pada saat itulah otonomi kebijakan pangan nasional mengalami erosi.

Hal ini menjadi semakin krusial dalam konteks fragmentasi geoekonomi kontemporer, di mana logika multilateralisme bebas yang dulu mendominasi tatanan perdagangan global kini bergeser ke arah proteksionisme dan pembentukan blok-blok perdagangan eksklusif (SEI, 2024). Dalam tatanan semacam ini, negara-negara dengan kapasitas produksi pangan surplus memiliki leverage politik yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara *net importer*. India, misalnya, dapat menggunakan kebijakan ekspor berasnya sebagai instrumen diplomasi—memberikan akses preferensial kepada negara-negara mitra strategis sembari membatasi akses bagi negara lain—sebuah praktik yang secara langsung memengaruhi kalkulasi kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.

Dari perspektif pertahanan dan keamanan nasional, kerentanan struktural ini semakin diperparah oleh disparitas antarprovinsi dalam hal ketersediaan, konsumsi, harga, dan distribusi beras

yang menciptakan wilayah surplus dan defisit yang tidak seimbang (Journal of Defense Technology and Engineering, 2025). Disparitas ini berarti bahwa bahkan dalam skenario di mana produksi nasional secara agregat mencukupi kebutuhan domestik, distribusi yang tidak merata tetap dapat memaksa daerah-daerah tertentu bergantung pada pasokan impor atau pasokan antarprovinsi yang rentan terhadap gangguan logistik. Kompleksitas geografis kepulauan Indonesia, dikombinasikan dengan kerentanan terhadap guncangan eksternal akibat dinamika geopolitik global, menjadikan persoalan ketergantungan impor beras sebagai isu multidimensi yang menyentuh ranah ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan negara secara simultan.**Implikasi Strategis dan Arah Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi strategis yang dapat dirumuskan untuk mengurangi kerentanan struktural Indonesia terhadap dinamika geoekonomi pangan global. Pertama, diversifikasi sumber impor menjadi langkah mitigasi jangka pendek yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada segelintir negara pemasok utama. Dengan memperluas jejaring negara asal impor, Indonesia dapat mengurangi risiko gangguan pasokan tunggal apabila salah satu negara pemasok utama tiba-tiba memberlakukan pembatasan ekspor.

Kedua, penguatan cadangan pangan pemerintah melalui optimalisasi peran Bulog dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah perlu terus didorong, khususnya dengan memastikan penyerapan gabah petani dilakukan pada momentum yang tepat—yakni saat panen raya—guna menghindari benturan kepentingan antara stabilisasi harga dan perlindungan petani (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025). Data Badan Pangan Nasional bahkan menunjukkan bahwa produksi terhadap konsumsi beras nasional sempat mengalami surplus hingga 3,3 juta ton, sebuah momentum yang semestinya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk menyerap hasil panen petani guna memperkuat cadangan domestik, bukan justru terburu-buru melakukan impor.

Ketiga, revitalisasi infrastruktur irigasi tetap menjadi kunci jangka menengah-panjang. Sebagaimana ditunjukkan dalam kajian determinan rasio ketergantungan impor beras, perbaikan jaringan irigasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas tampungan air seperti embung dan bendungan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan luas panen dan produksi, sekaligus secara bertahap menurunkan rasio ketergantungan impor (Jurnal Pangan, 2024). Keempat, diversifikasi konsumsi karbohidrat menjadi strategi struktural yang tidak kalah penting untuk mengurangi tekanan permintaan terhadap beras, dengan mendorong masyarakat mengonsumsi sumber karbohidrat lokal alternatif seperti sagu, jagung, atau umbi-umbian, sekaligus mengelola pola tanam yang lebih terintegrasi (Journal of Keberlanjutan, 2024).

Kelima, dan barangkali yang paling fundamental, Indonesia perlu memperkuat posisi diplomatiknya dalam forum-forum perdagangan pangan regional dan internasional, termasuk melalui kerangka kerja sama ASEAN, guna membangun mekanisme jaminan pasokan kolektif yang dapat melindungi negara-negara anggota dari guncangan kebijakan proteksionis sepihak negara produsen di luar kawasan. Penguatan kerja sama regional semacam ini sejalan dengan rekomendasi literatur mengenai ketahanan pangan kawasan Asia Tenggara yang menekankan pentingnya kebijakan perdagangan regional sebagai instrumen mitigasi risiko geopolitik pangan global (Goldenratio, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis-ekonomi domestik, melainkan harus dibaca sebagai cermin dari posisi struktural Indonesia dalam konstelasi kekuasaan ekonomi-politik global. Faktor domestik seperti penyusutan lahan sawah, perubahan iklim, tingginya konsumsi per kapita, dan infrastruktur irigasi yang belum optimal memang menjadi pendorong utama kebutuhan impor. Namun, dimensi eksternal berupa dinamika geoekonomi global—khususnya kecenderungan negara-negara produsen utama untuk memberlakukan kebijakan proteksionis dan pembatasan ekspor di tengah krisis,

sebagaimana terjadi pascainvasi Rusia ke Ukraina dan kebijakan larangan ekspor India—turut memperburuk kerentanan struktural Indonesia sebagai net importer beras.

Logika "*food as power*" menemukan relevansinya secara empiris dalam konteks ini: beras bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan secara bebas berdasarkan mekanisme pasar semata, melainkan juga instrumen yang dapat dimanfaatkan negara produsen untuk mengamankan kepentingan domestik mereka, bahkan dengan mengorbankan stabilitas pasokan negara-negara pengimpor. Bagi Indonesia, kondisi ini berarti bahwa kedaulatan pangan nasional senantiasa berada dalam bayang-bayang ketergantungan terhadap keputusan kebijakan negara lain yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan impor beras domestik dihadapkan pada dilema struktural antara kepentingan stabilisasi harga bagi konsumen dan perlindungan kesejahteraan petani sebagai produsen, sebuah ketegangan yang berpotensi memperdalam ketergantungan impor jika tidak dikelola dengan kebijakan yang terkoordinasi dan berorientasi jangka panjang.